

KETIMPANGAN SOSIAL DALAM PENDIDIKAN DI INDONESIA: ANALISIS PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Zahwa Ardhinia Naisa¹, Nur Khasanah²

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

e-mail: zahwa.ardhinia.naisa24001@mhs.uingusdur.ac.id
nur.khasanah@uingusdur.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji ketimpangan sosial dalam sektor pendidikan di Indonesia, yang masih merupakan tantangan signifikan bagi upaya pemerataan pembangunan nasional. Ketimpangan tersebut terlihat dalam berbagai aspek, termasuk dimensi ekonomi, geografis, sosial-budaya, gender, kualitas sumber daya manusia pendidik, serta aksesibilitas terhadap teknologi informasi. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor penyebab ketimpangan pendidikan, implikasinya terhadap mobilitas sosial, serta strategi strategis yang dapat diimplementasikan untuk mencapai pemerataan pendidikan melalui perspektif sosiologis. Penelitian ini menerapkan metode studi pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah dan data empiris terkini yang berkaitan dengan isu ketimpangan pendidikan di Indonesia. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa ketimpangan pendidikan di Indonesia dipicu oleh disparitas kondisi ekonomi, infrastruktur, dan nilai-nilai budaya yang memperkuat stratifikasi sosial. Akses terhadap pendidikan bermutu masih didominasi oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan daerah perkotaan. Kesenjangan ini berdampak pada penurunan mobilitas sosial, pengurangan daya saing sumber daya manusia, serta pelebaran jurang ketidakadilan sosial. Pemerintah telah berupaya mewujudkan pemerataan melalui program-program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Sekolah Penggerak Nasional (SPGN), serta digitalisasi pendidikan. Namun, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural. Ketimpangan pendidikan di Indonesia mencerminkan struktur sosial yang belum sepenuhnya adil. Diperlukan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, pemerataan infrastruktur pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta ekspansi akses teknologi agar sistem pendidikan dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang inklusif dan berkeadilan.

Kata kunci: ketimpangan pendidikan, sosiologi pendidikan, mobilitas sosial, pemerataan pendidikan, keadilan sosial.

Abstract

This study examines social inequality in the education sector in Indonesia, which remains a significant challenge to efforts to achieve equitable national development. This inequality is evident in various aspects, including economic, geographic, socio-cultural, gender, the quality of human resources for educators, and accessibility to information technology. The main objective of this study is to analyze the factors causing educational inequality, its implications for social

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 684
Prefix DOI: Prefix DOI:
10.8734/sindoro.v1i2.360
Copyright: Author
Publish by: SINDORO



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

mobility, and strategic strategies that can be implemented to achieve educational equality through a sociological perspective. This study applies a library research method by reviewing various scientific sources and the latest empirical data related to the issue of educational inequality in Indonesia. The research findings indicate that educational inequality in Indonesia is triggered by disparities in economic conditions, infrastructure, and cultural values that reinforce social stratification. Access to quality education is still dominated by high-income groups and urban areas. This gap has an impact on reduced social mobility, reduced human resource competitiveness, and widened the gap of social injustice. The government has attempted to achieve equity through programs such as the School Operational Assistance (BOS), the Smart Indonesia Program (PIP), and the National School Mover (SPGN), as well as the digitalization of education. However, their implementation still faces various structural obstacles. Educational inequality in Indonesia reflects a social structure that is not yet fully just. Policies oriented toward social justice, equitable distribution of educational infrastructure, improved teacher competency, and expanded access to technology are needed so that the education system can function as an instrument of inclusive and equitable social transformation. Keywords: educational inequality, sociology of education, social mobility, educational equity, social justice.	
--	--

PENDAHULUAN

Pendidikan memainkan peran krusial dalam pembangunan nasional, baik sebagai mekanisme peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun sebagai instrumen mobilitas sosial. Namun, realitas sosial mengindikasikan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada ketimpangan yang signifikan antarwilayah, strata sosial, dan gender. Ketimpangan tersebut menjadi salah satu penghalang utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan (Sahlan, 2025).

Badan Pusat Statistik 2023, sebagaimana dikutip dalam Daniel & Bahari (2024), menunjukkan bahwa disparitas pendidikan antara wilayah pedesaan dan perkotaan masih sangat mencolok. Data mengenai tingkat pendidikan tertinggi penduduk berusia 15 tahun ke atas mengungkapkan bahwa sekitar 5,11% penduduk pedesaan belum pernah mengenyam pendidikan formal, dan 12,39% tidak menyelesaikan pendidikan dasar (SD). Sebaliknya, di wilayah perkotaan, hanya 1,93% penduduk yang belum pernah bersekolah, dan 6,62% tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Data tersebut juga menunjukkan bahwa di perkotaan, sebanyak 49,16% penduduk berusia 15 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA atau setara. Namun, di pedesaan, hanya 27,98% penduduk yang berhasil mencapai jenjang tersebut. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa mayoritas penduduk di wilayah rural hanya mampu menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SD, yakni sekitar 31,13%. Perbedaan ini menandakan keterbatasan akses masyarakat pedesaan terhadap pendidikan bermutu.

Pendidikan secara ideal berfungsi sebagai sarana pemerataan peluang dan peningkatan kesejahteraan sosial. Namun, menurut Fukaro Ahada, (2025) sistem pendidikan sering kali memperkuat struktur ketimpangan yang telah mapan. Dari perspektif sosiologi pendidikan, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak selalu berperan sebagai mekanisme mobilitas sosial vertikal, melainkan juga sebagai alat yang memperkuat keberlanjutan sosial dan budaya dari kelompok yang berkuasa kepada kelompok yang lebih lemah. Ketimpangan pendidikan di

Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor geografis. Menurut Marwan et al., (2024) menunjukkan bahwa perbedaan infrastruktur pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan sangat kontras. Di perkotaan, sekitar 88% ruang kelas dalam kondisi memadai, sedangkan di pedesaan hanya 62%. Akses terhadap internet, laboratorium, dan perpustakaan juga jauh lebih terbatas di daerah terpencil. Kondisi ini memperdalam kesenjangan kualitas pembelajaran antarwilayah.

Selain faktor ekonomi dan geografis, ketimpangan pendidikan juga dipengaruhi oleh dimensi sosial dan budaya. Dalam beberapa komunitas tradisional, pandangan terhadap pendidikan perempuan masih terbatas, sehingga partisipasi mereka dalam pendidikan menengah dan tinggi relatif rendah (Fukaro Ahada, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan bukan semata-mata masalah ekonomi, melainkan juga cerminan dari struktur nilai dan norma sosial yang tidak setara. Menurut Pugu et al., (2025), pendidikan yang tidak merata mempengaruhi perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Ketika sebagian masyarakat tidak memperoleh pendidikan yang memadai, maka produktivitas dan daya saing nasional pun menurun. Hal ini juga memengaruhi stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Dari sudut pandang teori sosiologi pendidikan, seperti fungsionalisme struktural Robert K. Merton dan teori konflik Karl Marx, ketimpangan pendidikan dapat dipahami sebagai akibat dari struktur sosial yang tidak seimbang (Daniel & Bahari, 2024). Pendidikan di satu pihak berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial, tetapi di pihak lain dapat menjadi instrumen legitimasi status sosial tertentu. Oleh karena itu, analisis ketimpangan pendidikan melalui perspektif sosiologi pendidikan penting untuk memahami akar strukturalnya dan mencari solusi yang berbasis pada keadilan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial dalam pendidikan di Indonesia, mengidentifikasi dampaknya terhadap struktur sosial, serta menawarkan rekomendasi strategis untuk pemerataan pendidikan melalui pendekatan sosiologis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan menelaah berbagai sumber pustaka dan data empiris terkini. Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena ketimpangan pendidikan secara konseptual melalui berbagai hasil penelitian terdahulu dan teori sosiologi pendidikan. Melalui metode ini, penulis berupaya memahami realitas sosial dan pendidikan di Indonesia dengan menelaah secara sistematis sumber pustaka dan data empiris terkini. Fokus analisis diarahkan pada faktor penyebab, dampak sosial, serta upaya kebijakan yang telah dilakukan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan di Indonesia bukanlah fenomena yang muncul secara spontan, melainkan hasil dari struktur sosial yang telah berakar. Pendidikan sebagai institusi sosial pada dasarnya berperan dalam mentransmisikan nilai, norma, dan keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat (Sahlan, 2025). Namun, dalam praktiknya, pendidikan sering kali berfungsi sebagai mekanisme reproduksi sosial yang memperkuat hierarki sosial-ekonomi. Menurut Fukaro Ahada, (2025) sistem pendidikan di Indonesia menunjukkan pola konsisten di mana kelompok dengan status sosial tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pendidikan bermutu. Hal ini menandakan bahwa pendidikan tidak hanya merefleksikan struktur sosial yang ada, tetapi juga turut memperkuat dan mereproduksinya. Dengan kata lain, sistem pendidikan menjadi komponen dari mekanisme sosial yang mempertahankan ketimpangan

kelas. Ketimpangan tersebut terlihat jelas dalam dua dimensi utama: akses dan kualitas. Dari segi akses, masyarakat berpendapatan rendah menghadapi hambatan ekonomi dan geografis. Sementara itu, dari segi kualitas, institusi pendidikan di wilayah perkotaan memiliki fasilitas yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan yang berada di pedesaan (Marwan et al., 2024). Dengan demikian, pendidikan menjadi cerminan dari ketimpangan sosial yang lebih luas dalam masyarakat. Berikut beberapa dimensi ketimpangan dalam pendidikan.

1. Dimensi Ekonomi dalam Ketimpangan Pendidikan

Setiap komunitas sosial secara konsisten menjunjung tinggi nilai pendidikan, di mana tingkat pendidikan dianggap sebagai faktor yang mampu meningkatkan status sosial individu serta memengaruhi mobilitas sosialnya (Khoironi & Sudrajat, 2023). Salah satu faktor paling dominan yang memengaruhi ketimpangan pendidikan adalah aspek ekonomi. Kapasitas ekonomi keluarga sangat menentukan peluang anak untuk memperoleh pendidikan bermutu. Keluarga dengan pendapatan tinggi mampu mendanai institusi pendidikan unggulan, bimbingan akademik, dan akses teknologi yang mendukung proses pembelajaran. Sebaliknya, keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas sering kali kesulitan menanggung biaya pendidikan, bahkan untuk kebutuhan dasar seperti bahan ajar dan pakaian sekolah (Fukaro Ahada, 2025). Menurut Sahlan, (2025) perbedaan pendapatan menciptakan “stratifikasi pendidikan”, di mana institusi pendidikan elit menjadi ruang sosial eksklusif bagi kelompok menengah ke atas. Sementara itu, sekolah-sekolah negeri di pinggiran kota dan pedesaan sering kali kekurangan sarana serta tenaga pendidik yang memadai. Akibatnya, mutu pendidikan yang diterima siswa berbeda secara signifikan.

Data dari BPS 2023, sebagaimana dikutip dalam Daniel & Bahari (2024) menunjukkan bahwa 31,13% penduduk di pedesaan hanya menyelesaikan pendidikan dasar, sedangkan di perkotaan hanya 12%. Perbedaan ini menggambarkan bagaimana status ekonomi memengaruhi durasi pendidikan. Pendidikan, yang seharusnya menjadi instrumen mobilitas vertikal, justru memperkuat stratifikasi sosial karena peluang yang tidak setara. Dalam konteks teori konflik Karl Marx, ketimpangan pendidikan merupakan bagian dari reproduksi kapitalisme, di mana kelas dominan mempertahankan kekuasaannya dengan mengontrol sumber daya pendidikan. Institusi pendidikan berfungsi bukan hanya sebagai tempat pembelajaran, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menanamkan nilai-nilai kepatuhan dan hierarki sosial yang mendukung sistem ekonomi yang berlaku.

2. Dimensi Geografis: Ketimpangan antara Perkotaan dan Pedesaan

Di Indonesia, terdapat disparitas yang signifikan dalam kualitas sarana dan prasarana pendidikan antara institusi pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan umumnya telah dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran yang memadai, seperti ruang kelas yang kondusif, perpustakaan dengan koleksi literatur yang komprehensif, serta laboratorium ilmu pengetahuan alam dan teknologi informasi yang canggih (Fadillah et al., n.d.). Marwan et al., (2024) juga mengungkapkan bahwa institusi pendidikan di wilayah perkotaan memiliki tingkat kelayakan fasilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Sekitar 88% ruang kelas di kota dinilai memadai, sedangkan di pedesaan hanya 62%. Selain itu, akses terhadap teknologi informasi juga menjadi pembeda yang signifikan. Di kota, 85% institusi pendidikan memiliki koneksi internet, sedangkan di pedesaan hanya 30%. Perpustakaan tersedia di 75% sekolah di perkotaan, tetapi hanya di 45% sekolah pedesaan. Ketimpangan ini bukan hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, tetapi juga akses terhadap sumber pengetahuan dan pengalaman pembelajaran yang berbeda.

Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, ketimpangan geografis ini menciptakan “lingkaran kemiskinan pendidikan” (education poverty trap). Daerah dengan

infrastruktur pendidikan lemah cenderung menghasilkan lulusan yang kurang kompetitif, yang kemudian memperlambat kemajuan ekonomi lokal (Pugu et al., 2025). Akibatnya, ketimpangan wilayah semakin melebar. Program pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) memang dirancang untuk mengurangi kesenjangan ini. Namun, menurut Pugu et al., (2025), implementasinya sering terkendala oleh keterlambatan distribusi dana, lemahnya pengawasan, serta kurangnya adaptasi kebijakan terhadap karakteristik daerah. Dalam konteks ini, diperlukan inisiatif lebih intensif dari masyarakat dan pemerintah untuk terus mendorong peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, sehingga dapat terwujud pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan (Juventia & Yuan, 2024).

3. Ketimpangan Sosial-Budaya dan Gender

Selain faktor ekonomi dan geografis, dimensi sosial-budaya turut memperburuk ketimpangan pendidikan. Dalam beberapa masyarakat pedesaan dan daerah terpencil, masih terdapat pandangan tradisional yang menganggap pendidikan tidak terlalu penting, terutama bagi perempuan (Fukaro Ahada, 2025). Pandangan seperti ini menyebabkan tingkat partisipasi pendidikan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki di beberapa daerah. Kesenjangan sosial-budaya juga terlihat dalam perbedaan nilai dan ekspektasi terhadap pendidikan. Keluarga dari kelas sosial tinggi biasanya menanamkan nilai-nilai akademik dan mendorong anak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sebaliknya, keluarga miskin lebih fokus pada kebutuhan ekonomi jangka pendek, sehingga anak-anak mereka sering diarahkan untuk bekerja lebih awal.

Dari perspektif sosiologi pendidikan, fenomena ini sejalan dengan konsep *cultural capital* (modal budaya) dari Pierre Bourdieu. Siswa dari keluarga berpendidikan tinggi memiliki modal budaya yang lebih besar, seperti kemampuan berbahasa, literasi, dan cara berpikir akademik, yang sesuai dengan norma-norma institusi pendidikan formal. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga miskin cenderung tidak memiliki modal tersebut, sehingga berisiko tertinggal secara sistemik (Fukaro Ahada, 2025). Ketimpangan gender juga berdampak pada kesempatan kerja dan peran sosial. Pendidikan yang timpang menghasilkan pembagian kerja berbasis gender yang kaku, di mana perempuan lebih banyak menempati posisi pekerjaan informal dengan pendapatan rendah. Dalam konteks sosiologi pendidikan, ini menunjukkan bahwa ketimpangan dalam sistem pendidikan berkontribusi langsung pada reproduksi struktur patriarki dalam masyarakat.

4. Ketimpangan Kualitas Tenaga Pendidik

Kualitas tenaga pendidik menjadi salah satu indikator penting dalam menilai pemerataan pendidikan. Sayangnya, distribusi guru di Indonesia masih belum merata. Menurut Pugu et al., (2025), sebagian besar guru berkualitas dan bersertifikat terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) mengalami kekurangan tenaga pendidik profesional. Kondisi ini diperburuk oleh terbatasnya pelatihan dan fasilitas peningkatan kompetensi guru di daerah. Akibatnya, mutu proses belajar-mengajar menjadi tidak seimbang. Guru di wilayah perkotaan memiliki akses terhadap pelatihan, seminar, dan teknologi pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan guru di daerah terpencil. Hal ini menciptakan “kesenjangan pedagogis” yang berdampak langsung pada hasil belajar siswa.

Dalam perspektif teori fungsionalisme struktural Robert K. Merton, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai disfungsi sosial, yaitu ketika suatu lembaga (dalam hal ini sistem pendidikan) gagal menjalankan fungsinya untuk menciptakan pemerataan dan integrasi sosial (Daniel & Bahari, 2024). Ketimpangan kualitas tenaga pendidik menyebabkan fungsi laten dari

pendidikan yaitu reproduksi ketimpangan sosial menjadi lebih kuat dibandingkan fungsi manifestasinya, yaitu pemerataan pengetahuan dan keterampilan.

5. Ketimpangan dalam Akses Teknologi dan Informasi

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, terutama sejak pandemi COVID-19. Namun, digitalisasi pendidikan juga memperlihatkan ketimpangan baru yang dikenal sebagai digital divide (jurang digital). (Rahma & Kartiasih, 2024) menjelaskan bahwa ketimpangan akses internet, perangkat digital, dan literasi teknologi menciptakan kesenjangan pembelajaran antara siswa di kota dan desa. Institusi pendidikan di kota dengan koneksi internet stabil mampu melaksanakan pembelajaran daring secara efektif, sementara sekolah di daerah pedesaan sering terkendala sinyal, keterbatasan perangkat, dan minimnya pelatihan guru dalam penggunaan teknologi. Akibatnya, transformasi digital dalam pendidikan justru memperlebar kesenjangan akses dan kualitas pembelajaran. Untuk mengatasi hal ini, Rahma & Kartiasih, (2024) merekomendasikan pembangunan infrastruktur TIK yang lebih merata, terutama di daerah terpencil. Pemerintah juga perlu mendorong literasi digital bagi guru dan siswa agar pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara inklusif. Selain itu, reformasi kurikulum perlu diimplementasikan guna menyelaraskan kompetensi yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan pasar kerja, khususnya dalam bidang teknologi dan inovasi. Kemitraan strategis antara sekolah, sektor industri, dan institusi pendidikan tinggi juga harus diperkuat untuk mengurangi kesenjangan kompetensi yang ada (Juhara et al., 2025).

6. Dampak Ketimpangan Pendidikan terhadap Mobilitas Sosial

Ketimpangan pendidikan memiliki dampak jangka panjang terhadap mobilitas sosial masyarakat. Pendidikan yang tidak merata menyebabkan kesempatan untuk meningkatkan status sosial menjadi sangat terbatas bagi kelompok miskin. Anak-anak dari keluarga berpendidikan rendah cenderung mengulangi posisi sosial orang tuanya, sedangkan anak dari keluarga kaya tetap mempertahankan statusnya (Sahlan, 2025). Hal ini sesuai dengan konsep reproduksi sosial, di mana lembaga pendidikan berperan mempertahankan struktur sosial yang ada. Ketika pendidikan tidak berfungsi secara adil, masyarakat terjebak dalam stratifikasi sosial yang kaku. Akibatnya, terjadi stagnasi sosial dan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar.

Daniel & Bahari, (2024) menegaskan bahwa ketimpangan pendidikan berdampak tidak hanya pada individu, tetapi juga pada stabilitas sosial secara keseluruhan. Ketika sebagian masyarakat merasa terpinggirkan dari kesempatan pendidikan yang layak, muncul potensi disintegrasi sosial dan ketegangan antar kelas. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan bukan sekadar isu akademik, tetapi juga merupakan agenda sosial dan politik yang penting bagi stabilitas bangsa.

7. Peran Kebijakan Dan Inovasi Pendidikan Dalam Mengurangi Ketimpangan Di Indonesia

Inovasi dalam bidang pendidikan tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, melainkan harus tetap berorientasi pada pembentukan individu yang autentik, yang memiliki kesadaran mendalam terhadap realitas serta kemampuan untuk mengatasi tantangan dunia dan realitas yang dihadapinya. Dengan demikian, dapat dihasilkan manusia yang mampu menjalani kehidupan dunia dan realitas dengan sikap kritis serta kreativitas tinggi, yang pada akhirnya memungkinkan pemahaman mendalam terhadap eksistensi diri sendiri (Kadi et al., 2017)

Sistem Pemenuhan Guru Nasional (SPGN) merupakan suatu mekanisme yang mengatur penempatan guru dalam proses seleksi CPNS dengan tujuan meratakan distribusi pengajar di seluruh Indonesia. Mekanisme ini dibuat agar dapat memperbaiki secara maksimal kondisi pendidikan. Dengan adanya Sistem Pemenuhan Guru Nasional (SPGN), diharapkan tidak akan ada lagi wilayah yang mengalami kekurangan pengajar maupun daerah yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Diharapkan SPGN dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menyelesaikan ketidakmerataan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia (Rahmawati, n.d.)

Kebijakan pendidikan yang efektif dapat berkontribusi dalam mengatasi akar masalah ketimpangan ekonomi dengan mendorong kesetaraan akses terhadap pendidikan serta meningkatkan pengembangan sumber daya manusia. Namun, untuk mencapai hasil pendidikan yang setara, diperlukan upaya terkoordinasi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial di Indonesia (Judijanto et al., 2024). Program pendidikan inklusif merupakan salah satu kebijakan utama yang diterapkan untuk mengurangi ketimpangan pendidikan. Tujuan program ini adalah menyediakan kesempatan pendidikan yang setara bagi setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan yang memberikan prioritas pada wilayah terpencil dan terisolasi. Salah satunya adalah Program Indonesia Pintar (PIP), yang membantu keluarga kurang mampu, khususnya di daerah tertinggal, untuk memperoleh dana pendidikan (Sari & Riansi, 2024).

Penanganan kesenjangan mutu pendidikan memerlukan strategi yang komprehensif dan terarah. Pemerintah perlu memperkuat investasi pada infrastruktur pendidikan, khususnya di wilayah yang paling tertinggal. Selain itu, pemberdayaan tenaga pendidik harus dijadikan prioritas melalui program pelatihan berkelanjutan, terutama di daerah yang paling memerlukan. Dengan memastikan bahwa seluruh siswa, tanpa mempertimbangkan lokasi geografis atau latar belakang sosial-ekonomi, memperoleh pendidikan berkualitas setara, sistem pendidikan nasional dapat mendekati ideal keadilan dan kesetaraan (Darma Yanti et al., n.d.). Selain itu, standar hidup penduduk di seluruh negeri akan mengalami peningkatan berkat distribusi pembangunan yang merata, yang akan memberikan akses yang lebih luas bagi semua daerah terhadap kesempatan ekonomi, infrastruktur, layanan kesehatan, dan Pendidikan (Rizkina Sari Siregar et al., n.d.).

Penanganan tantangan infrastruktur dalam pendidikan di wilayah terpencil memerlukan kolaborasi antarsektor serta investasi substansial dari berbagai pihak. Dengan memperbaiki infrastruktur telekomunikasi, pasokan listrik, jaringan jalan, dan fasilitas sekolah, serta menyediakan pelatihan dan dukungan teknis yang diperlukan, akses dan mutu pendidikan bagi seluruh masyarakat dapat ditingkatkan tanpa diskriminasi. Tantangan akses internet merupakan aspek vital dalam konteks pendidikan di daerah terpencil. Hal ini mencakup keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, ketidakstabilan koneksi internet, biaya akses yang tinggi, keterbatasan perangkat, kebutuhan akan wi-fi publik, dukungan dari pemerintah dan sektor swasta, solusi alternatif seperti teknologi nirkabel dan satelit, penyesuaian materi pembelajaran, serta pengembangan kapasitas pengguna. Tantangan akses internet memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga non-profit, dan komunitas lokal. Melalui investasi pada infrastruktur telekomunikasi, subsidi akses internet, pendidikan literasi digital, dan solusi teknologi alternatif, akses dan mutu pendidikan di wilayah terpencil dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan internet (Firdaus & Ritonga, 2024).

Peningkatan aksesibilitas terhadap pendidikan bermutu bagi seluruh strata masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah terpencil, merupakan elemen krusial dalam upaya memutus

rantai kemiskinan dan mengurangi disparitas sosial. Lebih lanjut, dukungan melalui program pelatihan keterampilan kerja serta pemberdayaan ekonomi turut diperlukan guna memberikan peluang yang lebih luas bagi individu yang kurang terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Melalui inisiatif yang bersinergi, diharapkan ketimpangan pendidikan dapat diminimalisasi, sehingga masyarakat secara keseluruhan dapat menikmati kesejahteraan yang lebih merata (Yudha Maya Septiana et al., 2024).

Kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga pendidikan, serta dorongan dari masyarakat, dapat menjadi solusi efektif terhadap masalah ini. Langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah meliputi pembangunan infrastruktur yang memadai, alokasi dana yang tepat, peningkatan aksesibilitas pendidikan, pelaksanaan observasi terhadap wilayah dengan akses pendidikan yang buruk, serta investasi dalam pendidikan yang mencakup pengembangan profesionalisme, kompetensi, dan mutu tenaga pendidik di Indonesia. Kolaborasi dalam bidang pendidikan sangat esensial dan tidak boleh menjadi hambatan dalam penyelesaian permasalahan pendidikan di Indonesia (Siwitomo et al., 2023). Selain itu, kesadaran publik mengenai pentingnya pendidikan di wilayah terpencil harus ditingkatkan untuk mendorong dukungan yang lebih luas dari berbagai pihak. Dengan strategi ini, diharapkan kesenjangan pendidikan di daerah terpencil dapat diminimalkan secara signifikan (Wijayati et al., 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan di Indonesia merupakan isu struktural yang kompleks dan berakar pada faktor-faktor ekonomi, geografis, sosial-budaya, serta defisiensi dalam distribusi sumber daya manusia pendidik dan aksesibilitas teknologi. Pendidikan, yang seharusnya berperan sebagai instrumen mobilitas sosial dan pemerataan kesejahteraan, justru masih berfungsi sebagai mekanisme reproduksi ketimpangan sosial. Temuan analisis mengindikasikan bahwa kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan daerah perkotaan memperoleh akses yang lebih luas terhadap pendidikan bermutu, sedangkan kelompok miskin dan masyarakat pedesaan masih dihadapkan pada kendala signifikan baik dari aspek fasilitas, infrastruktur, maupun nilai-nilai budaya yang membatasi partisipasi, khususnya bagi perempuan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penyajian analisis mendalam mengenai ketimpangan pendidikan dari perspektif sosiologi pendidikan, dengan menekankan keterkaitan antara struktur sosial dan peran pendidikan dalam konteks ketidakadilan sosial. Penelitian ini juga menyediakan fondasi teoretis dan empiris untuk formulasi kebijakan yang lebih berorientasi pada pemerataan dan keadilan sosial, terutama dalam hal peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pengembangan infrastruktur pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta ekspansi literasi dan akses teknologi pendidikan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengadopsi pendekatan studi pustaka (*library research*), sehingga belum mampu menghasilkan data empiris lapangan yang mendalam. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menerapkan metode campuran (*mixed methods*) melalui survei, wawancara, atau observasi langsung guna menggali pengalaman empirik masyarakat dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pendidikan secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel, & Bahari, Y. (2024). Masalah Ketimpangan Pendidikan Indonesia dengan Kajian Struktural Fungsional Robert K. Merton. *Journal of Social Science Research*, 4, 2670-2680.
- Darma Yanti, A., Syaifudin, M., Tino Mulio, A., Hendra, D., & Marlina, E. (n.d.). Evaluasi Kebijakan Pendidikan : Strategi untuk Meningkatkan Kualitas dan Keadilan dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Journal of Islamic Education El Madani*, 4.
- Fadillah, R., Desmaryani, R., & Lestari, A. (n.d.). ANALISIS KETIMPANGAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI DAERAH PEDESAAN. *Jurnal Adijaya Multidisiplin*, 3, 217-225. <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/mj>
- Fukaro Ahada. (2025). Pengaruh Latar Belakang Sosial terhadap Kesempatan Pendidikan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1214-1220. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
- Judijanto, L., Kartika Devi, E., Fatimah, S., & Susanti, P. (2024). Pengaruh Kebijakan Pendidikan dan Distribusi Pendapatan terhadap Ketimpangan Ekonomi di Indonesia. 2(03), 178-187. <https://doi.org/10.58812/sek.v2i03>
- Juhara, H., Nugraha Jaya Pamungkas, A., Ridwan Firmansyah, T., Siti Patimah, I., & Saeful Bahri, A. (2025). Problematika Sistem Pendidikan Nasional. *Kumpulan Artikel Ilmiah Pendidikan Islam*, 3(1), 14-18. <https://doi.org/10.62070/kaipi.v3i1.229>
- Juventia, D., & Yuan, S. A. (2024). Ketimpangan Sosial Dalam Bidang Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2, 420-421.
- Kadi, T., Samarinda, I., Timur, K., & Awwaliyah, R. (2017). INOVASI PENDIDIKAN : UPAYA PENYELESAIAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Jurnal Islam NUSantara*, 01(02).
- Firdaus, K., & Ritonga, M. (2024). PERAN TEKNOLOGI DALAM MENGATASI KRISIS PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL. *JURNAL KEPEMIMPINAN & PENGURUSAN SEKOLAH*, 9(1). <https://doi.org/10.46245/543>
- Khoironi, M. F., & Sudrajat, A. (2023). Budaya Stratifikasi Sosial terhadap Kesenjangan Ekonomi Keluarga dan Kualitas Pendidikan pada Anak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(1), 25-34. <https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.55663>
- Marwan, I., Gustaman, R. F., & Gandi, A. (2024). Dikotomi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(3).
- Pugu, M. R., Elmiwati, & Rukimin. (2025). KETIMPANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA: STUDI KEBIJAKAN DAN EVALUASI INOVASI UNTUK MENJEMBATANI PERBEDAAN KELAS SOSIAL. *Berajah Journal Jurnal Pembelajaran Dan Pengembangan Diri*, 5, 295-304.
- Rahma, F. S., & Kartiasih, F. (2024). Pengaruh Infrastruktur Transportasi serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap Ketimpangan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13, 153-170.
- Rahmawati, A. P. (n.d.). *Seminar Nasional Inovasi Pendidikan (SNIP) 2021 dan Seminar Nasional Guidance Counseling Project (GCP 2021) SHEs: Conference Series 5 (2) (2022) 293-300 Sistem Pemerataan Guru Nasional (SPGN) Sebagai Sistem Penyebaran Guru Untuk Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Daerah 3T*. <https://jurnal.uns.ac.id/shes>

- Rizkina Sari Siregar, A., Hamni Lubis, N., & Isfa, F. (n.d.). Pentingnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 5, 51-56. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i4.3424>
- Sahlan. (2025). Analisis Peran Pendidikan Dalam Mengubah Stratifikasi Sosial. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1). <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety>
- Sari, F., & Riansi, S. E. (2024). PERAN STAKEHOLDER DALAM MENGATASI KETIMPANGAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL : TANTANGAN DAN SOLUSI. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9.
- Siwitomo, A. P. D., Fitriyani, N. N., Fadhilah, N. N., & Mafiqoh. (2023). *Kolaborasi Pendidikan: Strategi Inovasi Mengatasi Permasalahan Pendidikan Di Indonesia*. 64-67.
- Wijayati, I. W., Hotman, F., Damanik, S., & Prawirosastro, C. L. (2025). Kesenjangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil: Analisis Kebijakan dan Alternatif Solusi. In *Journal Scientific of Mandalika (jsm) e-ISSN* (Vol. 6, Issue 3).
- Yudha Maya Septiana, Solfema Solfema, & Lili Dasa Putri. (2024). Upaya dalam Pemerataan Pendidikan di Daerah Terpencil. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(6), 162-169. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1446>